

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan istri pejabat sering kali dipahami secara sederhana sebagai pendamping saja. Pandangan tersebut muncul karena dalam berbagai agenda pemerintahan, istri pejabat kerap hadir bersama suami dalam kegiatan resmi, kegiatan sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan. Namun, apabila dilihat lebih mendalam, posisi istri pejabat tidak hanya berkaitan dengan fungsi pendampingan yang bersifat simbolik. Mereka juga memiliki ruang keterlibatan sosial dan politik yang terbentuk melalui jabatan-jabatan organisasi, kegiatan pemberdayaan masyarakat, jaringan perempuan, serta komunikasi langsung dengan warga. Salah satu contoh seorang istri yang disorot dalam kepemimpinan suaminya dapat dilihat dalam diri seorang Michelle Obama. Dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Michelle Obama: Exploring the Narrative”* oleh Maria Meyers dan Carmen Goman menuliskan bahwa Michelle Obama pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada saat kampanye pemilu tahun 2008, yaitu ketika suaminya, Barack Obama, mencalonkan dirinya sebagai presiden. Di media, ia digambarkan sebagai wanita kulit hitam yang tidak patriotik, stereotip, dan pemaarah. Penelitian tersebut mengatakan bahwa Michelle Obama lebih populer dari pada Barack Obama. Penelitian tersebut mengkaji mengenai narasi yang dilakukan Michelle Obama yang diciptakan oleh ibu negara dan Gedung Putih melalui video yang diunggah ke YouTube. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk mendefinisikan ulang dirinya yang lebih bisa diterima masyarakat. Meyers dan Goman mengkaji narasi dari video yang diunggah oleh Gedung Putih, outlet berita dan hiburan arus utama serta organisasi terkait, dengan berfokus pada interseksionalitas gender, ras, dan kelas dalam cerita Michelle Obama. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa cerita Michelle Obama mencerminkan narasi neoliberal yang dibingkai oleh 2 tema. Tema yang pertama adalah Impian Amerika dapat dicapai melalui pendidikan, kerja keras, dan ketekunan, dan tema yang kedua adalah peran sebagai ibu dan keluarga adalah yang utama (Meyers dan Goman, 2017).

Dalam narasi neoliberal ini, rasisme dan kemiskinan merupakan hambatan yang harus diatasi melalui pengambilan keputusan yang tepat, dan gender dilihat dari sudut pandang sempit sebagai ibu dan bukan dari ketidaksetaraan gender. Narasi tersebut dibentuk dan dibatasi oleh ras, latar belakang kelas, serta gender Michelle Obama yang merupakan seorang perempuan, serta tujuan untuk menciptakan kepribadian publik yang lebih dapat diterima (Meyes dan Goman, 2017).

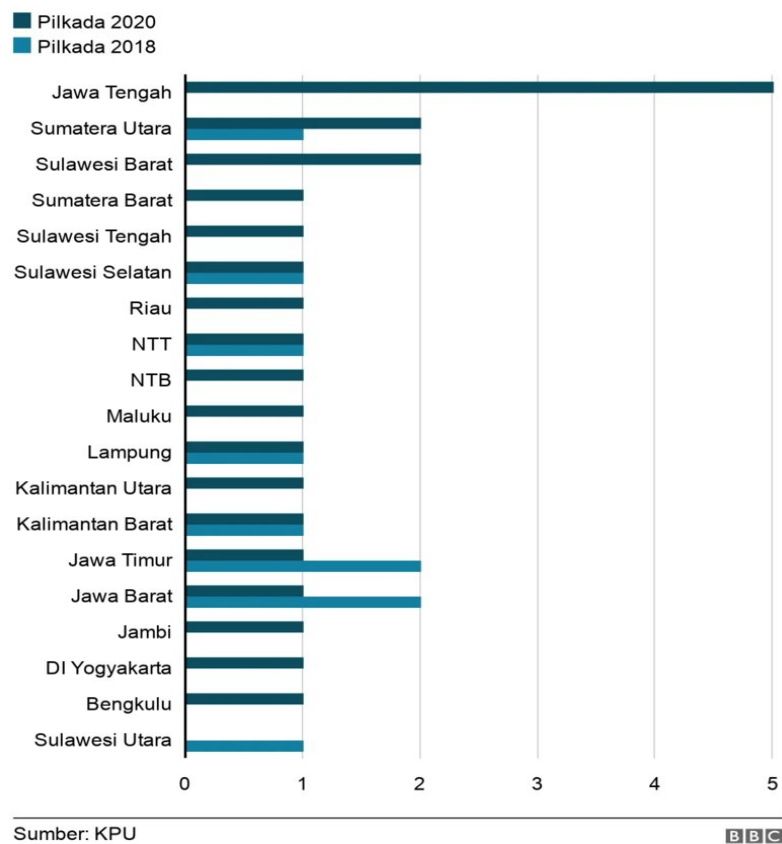
Ada juga beberapa contoh pemimpin perempuan di dunia yang sudah berhasil dibidangnya masing-masing. Seperti Jacinda Ardern yang merupakan seorang Perdana Menteri Selandia Baru. Ia mendapatkan pujian secara luas karena memimpin salah satu tanggapan untuk menangani virus covid-19 paling sukses di dunia. Jacinda bersama dengan Partai Buruh-nya menang pada saat pemilihan bulan Oktober 2020. Setelah dilantik ia memilih kabinet dari berbagai macam latar belakang. Dari 20 anggota, ada 8 orang perempuan, 5 orang dari suku Maori, 3 orang dari suku Pasifika, dan 3 orang yang merupakan LGBTQ+. Kabinet ini adalah kabinet pertama yang mewakili seluruh rakyat Selandia Baru (Sapira, 2023).

Di Indonesia, sepanjang kepala daerah laki-laki menjabat, mereka sering kali ditemani atau didampingi oleh istri mereka. Istri mereka ini tidak hanya sekedar mendampingi saja selama masa jabatan suaminya. Tentunya ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan dan peran yang diperankan seorang istri kepala daerah. Seringkali istri kepala daerah ditemui sedang melakukan kunjungan lapangan ke beberapa daerah yang dipimpin suaminya. Sehingga dapat dikatakan bahwa istri kepala daerah juga memiliki peran yang sama dengan suaminya.

Bahkan menurut data ada banyak istri kepala daerah yang menjadi calon kepala daerah. Pada tahun 2020, setidaknya ada 29 orang istri kepala daerah yang akan mencalonkan diri. Menurut penelitian dari Nagara Institute, yang merupakan sebuah lembaga kajian politik di Kota Jakarta, ada 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan dinasti politik pada pilkada 2020. Data tersebut menunjukkan ada 67 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. Setidaknya ada 29 orang dari 57 orang perempuan yang merupakan istri kepala daerah yang sedang menjabat atau sedang menjabat (BBC, 2020).

Istri bupati maju Pilkada 2020

15,7% dari total kandidat perempuan adalah istri bupati aktif dan non-aktif



Gambar 1.1 Data Istri Bupati yang Maju ke Pilkada Tahun 2020

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55121695>

Istri kepala daerah atau istri pejabat sering kali secara otomatis menempati posisi tertentu dalam organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, maupun berbagai organisasi perempuan lainnya. Posisi tersebut membuat mereka berada dalam ruang publik yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, istri pejabat tidak hanya hadir sebagai simbol keluarga pejabat, tetapi juga ikut menjalankan peran sosial yang berkaitan dengan isu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perempuan, anak, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat..

Pada tanggal 24 Februari 2025 kemarin, Listyati Purnama Rusdiana, istri dari Iswar Amminudin yang merupakan Wakil Wali Kota Semarang. Setelah dilantik, beliau mengatakan akan segera menyusun kepengurusan dan program kerja yang sejalan dengan kebijakan Tim Penggerak PKK Provinsi maupun kebijakan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Beliau mengatakan bahwa Program Tim Penggerak PKK yang utama adalah upaya bersih-bersih yang meliputi pilah sampah. Selain itu, akan dilakukan juga pencegahan stunting (Hapsari, 2025).

Peran istri kepala daerah juga memiliki peran yang penting dalam usaha pembangunan daerah. Istri kepala daerah dapat menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat dengan cara menciptakan inovasi serta kegiatan yang dilakukan melalui partisipasi dan pemberdayaan keluarga (MC Kota Padang, 2022).



Gambar 1.2 Pengukuhan Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: <https://ntbprov.go.id/post/gubernur-ntb-istri-kepala-daerah-emban-tugas-untuk-kemajuan-daerah>

Istri kepala daerah juga dapat berperan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa disebut PAUD dan Bunda Literasi. Kedua jabatan ini merupakan peran yang penting dalam meningkatkan pembangunan daerah. Pada tahun 2022 di Nusa Tenggara Barat telah dilakukan pengukuhan Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc. Beliau menjelaskan bahwa Bunda PAUD dan Bunda Literasi tidak hanya memiliki tantangan meningkatkan minat baca, tetapi juga meningkatkan kesadaran mengenai literasi digital untuk memberikan proteksi terhadap konten yang sesuai keluarga dan lingkungannya (Bidang IKP, 2022).

Peran istri dalam kepemimpinan juga terlihat dari ibu Iriana Joko Widodo dalam mendampingi bapak Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk meresmikan beberapa

infrastruktur yang ada di Surabaya. Infrastruktur yang dimaksud adalah Gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Jalan Layang Djuanda, jembatan dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur bagian utara. Selain itu, kunjungan kerja kali ini bertujuan untuk melakukan peninjauan pasar di Surabaya (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).



Gambar 1.3 Ibu Iriana Joko Widodo memeluk warga Ukraina pada saat menjalankan misi damai

Sumber: <https://www.ksp.go.id/iriana-sosok-perempuan-dalam-proses-perdamaian.html>

Tidak hanya di dalam negeri saja, ibu Iriana Joko Widodo juga ikut mendampingi bapak Joko Widodo dalam misi damai bapak Joko Widodo ke Ukraina. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden yang juga merupakan Guru Besar bidang HAM dan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Siti Ruhaini Dzuhayatin, mengatakan bahwa kehadiran ibu Iriana bersama dengan bapak Joko Widodo ke kota Kyiv, Ukraina, menjadikan kunjungan tersebut seperti kunjungan persahabatan antar keluarga yang sedang mengalami masalah. Beliau juga mengatakan bahwa keterlibatan perempuan

dalam proses resolusi konflik dapat mempercepat tercapainya perdamaian yang hakiki. Menurutnya, perempuan lebih memikirkan dan mementingkan aspek proteksi kemanusiaan dari pada ambisi dan politis. Dalam kesempatan tersebut, ibu Iriana Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada pusat Ilmiah dan Bedan Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina (Kantor Staf Presiden, 2022).

Contoh lain juga ada di setiap tahun dalam kegiatan rapat kerja nasional dimana kepala daerah, istrinya, serta rombongan dari daerah masing-masing menghadiri undangan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bernama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Kedua kegiatan tersebut diadakan secara bergiliran di salah satu kota di Indonesia. Tahun ini tuan rumah dari kegiatan APEKSI adalah Kota Balikpapan dan tuan rumah dari kegiatan JKPI adalah Kota Banjarmasin.

Dalam kedua kegiatan tahunan tersebut, istri kepala daerah tidak hanya melakukan pendampingan suaminya, mereka juga mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, yaitu *Ladies Program*. Jadi, ketika kepala daerah sedang melakukan rapat kerja bersama dengan kepala daerah lain, istri mereka juga melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung suaminya. Dalam kegiatan *Ladies Program* ini, istri-istri kepala daerah dapat menjalin tali silaturahmi sebagai Ketua PKK. Selain itu, istri-istri kepala daerah juga dapat bertukar ide dan pengalaman mereka dalam usaha pengembangan program kesejahteraan keluarga di daerah masing-masing (Telaumbanua, 2024).

Ladies Program APEKSI tahun ini adalah *cooking class*. Kegiatan *cooking class* ini menghadirkan bintang tamu, yaitu *chef* Firhan dari *Master Chef Indonesia*. Menu yang dibuat adalah gohyong dan minuman *creamy loaded mango*. Tidak hanya *cooking class*, terdapat juga *jet ski sport* bagi para istri kepala daerah yang mau (Rahayu, 2024). Sedangkan *Ladies Program* JKPI tahun ini adalah memperkenalkan kain Sasirangan. Tidak hanya itu, *Ladies Program* kali ini juga mengenalkan budaya dari Banjarmasin yaitu, melukis Tanggui atau topi

khas Banjarmasin, tradisi Betatai yang merupakan tradisi mandi-mandi bagi pasangan calon pengantin Banjarmasin, serta 41 macam makanan dan kuliner khas Banjarmasin (Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, 2024).

Dalam perspektif komunikasi politik, keterlibatan istri pejabat dapat dipahami sebagai bagian dari komunikasi politik nonformal. Komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh aktor formal seperti kepala daerah, anggota legislatif, partai politik, maupun pejabat pemerintahan, tetapi juga oleh individu atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan persepsi publik mengenai kekuasaan, kebijakan, dan kepemimpinan. McNair menjelaskan bahwa komunikasi politik mencakup seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor politik, media, dan masyarakat dalam proses pembentukan makna politik (McNair, 2018:4). Dengan demikian, kegiatan sosial yang dilakukan oleh istri pejabat dapat memiliki dimensi komunikasi politik karena berkaitan dengan penyampaian pesan, pembentukan citra, pembangunan relasi sosial, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

Dapat dilihat dari beberapa contoh diatas, istri kepala daerah merupakan sosok yang penting selama masa jabatan suaminya. Mereka tidak hanya sekedar mendampingi saja, namun mereka juga berperan dalam berbagai kegiatan yang memerlukan sentuhan seorang perempuan. Penelitian ini akan membahas mengenai narasi politik istri-istri kepala daerah yang juga berperan penting selama masa jabatan suaminya. Istri-istri kepala daerah ini adalah ibu Krisseptiana atau yang biasa disapa dengan Tia Hendi yaitu istri dari bapak Hendrar Prihadi yang dulunya adalah Walikota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana, yaitu istri Wakil Walikota Semarang dan ibu Inggit Soraya sebagai istri Walikota Pekalongan.

Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai cerita awal istri-istri kepala daerah yang sudah disebutkan diatas ketika masuk atau terjun ke dunia politik, komunikasi politik yang dilakukan istri-istri kepala daerah tersebut, serta peran apa saja yang diperankan istri-istri kepala daerah tersebut selama masa jabatan suaminya. Istri-istri kepala daerah yang akan dijadikan subjek dalam

penelitian ini adalah Krisseptiana sebagai istri mantan Walikota Semarang yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Hendrar Prihadi, Listyati Purnama Rusdiana sebagai istri Wakil Walikota Semarang, yaitu Iswar Aminuddin dan Inggit Soraya sebagai istri Walikota Pekalongan, yaitu bapak Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Contoh-contoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh istri-istri kepala daerah diatas dalam prosesnya terdapat narasi yang tersirat. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai narasi politik istri kepala daerah tersebut selama masa jabatan suaminya. Sebelum menjadi tokoh politik, istri kepala daerah adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang wanita karir. Ketika mereka menjadi istri kepala daerah peran-peran tersebut akan berganti menjadi tokoh yang dikenal dengan masyarakat sebagai tokoh politik. Untuk mengetahui cerita mengenai bagaimana suami dari istri kepala daerah yang dijadikan subjek dalam penelitian ini terjun ke dunia politik dan membuat istrinya menjadi tokoh politik juga akan dilakukan dengan cara meneliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas terlihat bahwa istri-istri kepala daerah tersebut tidak hanya mendampingi suaminya selama masa jabatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka memiliki peran yang sama dengan suami-suami mereka dengan program yang mereka kerjakan. Seperti yang dilakukan oleh ibu Krisseptiana, ibu Peni Yulianigsih, dan ibu Listyati Purnama Rusdiana.

Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengalaman politik ibu Krisseptiana, ibu Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya sebagai istri pejabat. Masalah penelitian tersebut akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman politik ibu Krisseptiana, ibu Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya sebagai istri pejabat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan dan ilmu baru bagi pembaca mengenai komunikasi politik istri kepala daerah selama masa jabatannya serta narasi politik yang mereka lakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengalaman politik ibu Krisseptiana, ibu Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya sebagai istri pejabat.

1.4.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan mengedukasi masyarakat bahwa istri kepala daerah memiliki peran yang sama dengan suaminya dalam berpolitik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan dasar yang memandu peneliti dalam melakukan tindakan. Keyakinan ini akan dibawa ke dalam proses penelitian oleh seorang peneliti dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai pandangan yang luas (Creswell dan Poth, 2018, p. 50). Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak berdiri secara tunggal dan objektif, melainkan dibentuk melalui pengalaman, interaksi, bahasa, dan makna yang dikonstruksi oleh individu. Dalam penelitian kualitatif, paradigma konstruktivis digunakan untuk memahami bagaimana subjek penelitian

memberi makna terhadap pengalaman hidup yang mereka jalani (Creswell dan Poth, 2018, p. 59).

Paradigma ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman politik istri pejabat, yaitu pengalaman yang bersifat subjektif, personal, dan kontekstual. Pengalaman Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya tidak dapat dipahami hanya melalui fakta-fakta kegiatan atau jabatan yang mereka miliki. Pengalaman tersebut perlu dipahami melalui cerita, penafsiran, perasaan, konflik, dan makna yang mereka bangun terhadap peran sebagai istri pejabat (Creswell dan Poth, 2018, p. 59).

Dalam paradigma konstruktivis, peneliti tidak berusaha mencari satu kebenaran tunggal mengenai peran istri pejabat. Penelitian ini justru berupaya memahami keragaman pengalaman yang muncul dari masing-masing informan. Setiap informan memiliki latar belakang, posisi sosial, dan pengalaman hidup yang berbeda sehingga cara mereka memahami politik dan peran publik juga berbeda (Creswell dan Poth, 2018, p. 50). Penggunaan paradigma konstruktivis juga sesuai dengan pendekatan naratif yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan naratif memandang pengalaman manusia sebagai cerita yang disusun melalui urutan peristiwa, konflik, perubahan, dan pemaknaan. Dengan demikian, pengalaman politik istri pejabat tidak hanya dipahami sebagai fakta sosial, tetapi sebagai cerita tentang bagaimana mereka mengalami perubahan peran, menghadapi tekanan, melakukan adaptasi, dan menemukan makna baru dalam posisi sebagai istri pejabat.

1.5.2 State of The Arts

Penelitian terdahulu yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini berjudul “Strategi Komunikasi Istri Politisi dalam Pemasaran Politik dalam Upaya Membantu Karir Politik Suami di Kabupaten Garut” (Muttaqin, 2020). Penelitian tersebut membahas mengenai strategi politik dari istri politisi yang ditinjau dari segi taktik *Pull*, *Push*, *Pass*. Kriteria istri politisi dalam penelitian

tersebut yaitu, pernah berstrategi dalam upaya membantu suami dan aktif dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi istri politisi dari segi taktik *Pull* menggunakan media sosial sebagai media utama dalam melaksanakan strategi yang menunjukkan aktifitas sosial para istri politisi dalam membangun citra baik serta penyampaian pesan politik. Untuk taktik *Push*, para istri politisi melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian untuk taktik *Pass* yaitu adanya dukungan dari tokoh yang dikenal serta memiliki pengaruh dalam masyarakat.

Kemudian penelitian lain yang ditemukan penulis berjudul “*Rhetorical Media Framing of Two First Lady Political Candidates Across Cultures*” (Kalyango, Jr, Winfield, 2009). Penelitian tersebut membahas mengenai retorika yang digunakan untuk membingkai pemberitaan dua ibu negara yang merupakan kandidat dari Uganda dan Amerika Serikat pada beberapa minggu-minggu terakhir kampanye politik pertama mereka dalam jabatan legislatif, sementara suami mereka masih menjabat sebagai presiden. Penelitian ini menilai pemberitaan dalam 2 budaya politik yang berbeda dengan bentuk demokrasi yang berbeda dalam media “*The Daily Monitor*” dan “*The New Vision*” di Uganda, serta “*The New York Times*” dari Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar menekankan pada retorika *gender-specific* untuk membingkai Janet Museveni dan Hillary Clinton selama kampanye mereka. Surat kabar Amerika Serikat memberitakan pidato kampanye dan *platform* inisiatif perdamaian internasional dan keamanan nasional Hillary Clinton. Namun, pers Uganda tidak menyoroti pernyataan Janet Museveni mengenai perang di utara dan inisiatif perdamaian. Surat kabar ini menggarisbawahi tugas keluarga ibu negara dan membingkai mereka sebagai sesosok yang lemah secara emosional dan tidak layak berperan diluar peran mereka sebagai istri tokoh politik.

Penulis juga menemukan penelitian lain berjudul “*From Wife to Presidential Partner: The Policy Agenda of The First Lady of The United States*” (Kuipers dan Timmermans, 2021). Penelitian tersebut membahas mengenai sosok “ibu negara” yang merupakan tokoh masyarakat Amerika paling terkemuka dan paling berpengaruh yang tidak dipilih melalui proses pemilihan umum. Penelitian tersebut menunjukkan analisis mengenai hubungan antara “ibu negara” dengan permasalahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 2013 berdasarkan analisis konten artikel “*The New York Times*”, menggunakan sistem klasifikasi topik yang dikembangkan dalam Proyek Agenda Komparatif. Hasil dari penelitian tersebut, “ibu negara” semakin dikaitkan dengan kebijakan dari waktu ke waktu, bahwa mereka berkaitan dengan masalah kasih sayang terutamanya, bahwa mereka memiliki agenda yang cukup beragam, bahwa agenda mereka tidak memiliki hubungan dengan agenda presiden, serta tidak ada perpecahan partisan yang jelas. Seiring berjalannya waktu, “ibu negara” telah menjadi pendukung kebijakan dan mitra politik yang lebih kuat bagi presidennya.

Penelitian lain yang ditemukan penulis berjudul “*The Soft Power of a First Lady – Constructing Identities for First Ladies in The Chinese and American Media*” (Zhang, 2017). Penelitian ini membahas mengenai *soft power* yang menggantikan *hard power* dalam menjadi saluran penting bagi negara untuk memajukan agenda mereka dalam urusan internasional. Wacana media merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan *soft power* karena memiliki dampak material terhadap dunia melalui pilihan dalam konstruksi identitas “ibu negara”. Dengan memadukan metode berbasis korpus dengan analisis manual tingkat mikro terhadap berita berbahasa Inggris dari sumber berita Tiongkok dan Amerika, analisis komparatif tentang bagaimana media Amerika dan Tiongkok mengkonstruksi identitas Peng Liyuan dan Michelle Obama dilakukan dalam pendekatan analisis wacana kritis. Pilihan kata kunci, strategi penamaan, transitivitas dan metafora dalam kedua media tersebut

menunjukkan perbedaan keduanya dalam menyeimbangkan identitas ganda dan campuran dari kedua “ibu negara” ini, walaupun terdapat kesamaan dalam mengedepankan identitas selebritas masing-masing “ibu negara”. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai *soft power* dalam budaya Tiongkok dan Amerikan serta bagaimana konstruksi identitas “ibu negara” berkontribusi terhadap promosi *soft power* mereka.

Penulis juga menemukan penelitian lain yang relevan dengan penelitian penulis berjudul “*From First Lady To Presidential Candidate: Masculinization in News Coverage of Female Politicians*” (Alvarez-Monsivais, 2020). Penelitian ini membahas mengenai kasus calon presiden yang sebelumnya adalah “ibu negara”, yaitu Cristina Fernandez dari Argentina, Hillary Clinton dari Amerika Serikat, dan Margarita Zavala dari Meksiko. Tujuannya adalah untuk mendaftar, di surat kabar nasional yaitu “*La Nacion, Pagina/12*”, “*The Wall Street Journal*”, “*The New York Times*”, “*Reforma*” dan “*La Jordana*” yang merupakan atribut kepribadian, agenda tematik, dan nada dalam berita muncul pada kedua periode tersebut. Feminin yang identik dengan empati, kejujuran, dan selebritis, kemudian maskulin yang identik dengan kepemimpinan, kecerdasan, dan ketangguhan merupakan ciri-ciri kepribadian yang ditetapkan secara deduktif, serta topik lembut atau feminin, yaitu budaya, kesehatan, dan pendidikan, kemudian keras atau maskulin, yaitu ekonomi, keamanan dan korupsi, dan kebijakan luar negeri. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa maskulinisasi kepribadian politik dan agenda tematik selama pencalonan, tidak ditemukan secara signifikan ketika masih berstatus sebagai “ibu negara”. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nada berita negative ketika kandidat perempuan dihadirkan dari kepribadian perempuan dan topik maskulin. Diantara kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian tersebut, perempuan yang mencalonkan diri sebagai presiden dipaksa untuk lebih strategis dalam melaksanakan tindakan politik mereka agar dinilai mampu oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang tidak

diasosiasikan secara budaya dengan feminitas. Penyelidikan menyimpulkan bahwa pers menempatkan perempuan politik dalam sebuah paradoks antara diliput secara jurnalistik sebagai perempuan atau sebagai politisi, membuat mereka memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden.

Penelitian lain berjudul “*Michelle Obama as a Political Symbol: Race, Gender, and Public Opinion Toward The First Lady*” (Badas dan Stauffer, 2019). Penelitian ini membahas mengenai komentar populer tentang Michelle Obama yang berfokus pada kepentingan simbolis masa jabatannya sebagai “ibu negara” Afrika-Amerika pertama di Amerika Serikat. Terlepas dari pernyataan tersebut, hanya sedikit penelitian yang meneliti opini publik terhadap Michelle Obama dan sejauh mana ras dan gender mempengaruhi penilaian publik terhadapnya. Penelitian yang meneliti tentang bagaimana persinggungan ras dan gender mempengaruhi sikap politik terhadap Michelle Obama dan kemampuannya untuk berperan sebagai simbol politik yang bermakna bahkan lebih sedikit. Dengan menggunakan polling opini publik dari tahun 2008 hingga 2017 dan data dari survei Perempuan Kulit Hitam di Amerika, penelitian ini menguji opini publik terhadap Michelle Obama berdasarkan ras, gender, dan titik temu antara keduanya. Penelitian ini menemukan bahwa orang Amerika keturunan Afrika pada umumnya lebih menyukai Michelle Obama dibandingkan orang Amerika berkulit putih, dengan perbedaan yang minimal antara pria dan wanita. Walaupun perempuan berkulit putih tidak lebih mungkin memiliki pandangan positif terhadap Michelle Obama dibandingkan laki-laki kulit putih, penelitian ini menunjukkan bahwa mereka lebih mungkin memiliki informasi tentang inisiatif “*Let’s Move*” milik Michelle Obama. Kemudian yang terpenting, penelitian ini menunjukkan bahwa Michelle Obama berperan sebagai simbol politik yang unik bagi perempuan Afrika-Amerika dan kehadirannya dalam politik meningkatkan penilaian perempuan kulit hitam terhadap kelompok ras-gender mereka secara signifikan.

Ada juga penelitian lain yang ditemukan penulis berjudul “*The Rise of the Rhetorical First Lady: Politics, Gender Ideology, and Women’s Voice, 1789-2002*” (Parry-Giles dan Blair, 2002). Penelitian ini membahas mengenai kebangkitan retorik “ibu negara” Martha Washington hingga Laura Bush dalam mengkontekstualisasikan dokumen publik dan pribadi para perempuan politik tersebut dalam ideologi gender pada masanya. Dalam perjalanannya membuktikan cara-cara dimana peran “ibu negara” memberdayakan dan membatasi kinerja mereka, penelitian tersebut menunjukkan kontribusi politik “ibu negara” dari tahun 1789 hingga 1920 di bidang politik sosial dan kesukarelaan yang baik hati, yang berfungsi sebagai peran politik pendahulu untuk kebangkitan retorik bertahap “ibu negara”. Ketika “ibu negara” lebih rutin berbicara dari mimbar “ibu negara” (1920-2002), mereka meniru penampilan para pendahulunya, dengan membawa upaya sukarela mereka ke panggung publik. Dalamnya prosenya, mereka memperluas ideologi keibuan republik pada abad ke-19, ibu dari Partai Republik di abad ke-20, seperti yang dilakukan oleh banyak “ibu negara” masa kini, menjadi pembela yang lebih vokal atas nama anak-anak bangsa dan masalah sosial mendesak lainnya. Meskipun jabatan tersebut sering kali membatasi aktivitas “ibu negara” hanya pada isu-isu non-pemerintah, banyak dari mereka yang memperlus sifat politik dari jabatan tersebut, serta membawa politik sosial mereka ke panggung publik dan membantu menciptakan peran bagi partisipasi perempuan dalam ranah politik.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang termasuk kedalam *state of the arts* diatas terletak pada fokus penelitian yang berfokus pada cerita awal mula seorang kepala daerah memilih untuk terjun atau masuk ke dunia politik, komunikasi politik yang istri mereka lakukan dan peran istri kepala daerah yang dijadikan subjek penelitian ini, yaitu ibu Krisseptiana, ibu Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya ketika suaminya menjabat. Teori yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan

penelitian ini adalah feminisme marxisme, feminisme liberal, komunikasi politik dan metode penelitian naratif.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Komunikasi Politik

Komunikasi politik bergantung pada hal-hal berbasis interdisipliner yang mengacu pada konsep-konsep dari komunikasi, ilmu politik, jurnalisme, sosiologi, psikologi, sejarah, retorika, dan lain sebagainya. Pembahasan komunikasi politik tidak hanya sebatas konteks pemilu, namun juga mempertimbangkan peran komunikasi dalam pemerintahan, menggabungkan aktivitas komunikasi yang mempengaruhi operasi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, partai politik, kelompok yang berkepentingan, komite aksi politik, serta pihak lain yang terlibat dalam proses politik (Kaid dan Holtz-Bacha, 2008).

Perhatian terbesar dari komunikasi politik adalah sumber-sumber utama komunikasi politik dan pesan-pesan politik, seperti pidato politik, iklan politik yang ditayangkan di televisi, poster politik dan iklan cetak, debat politik yang ditayangkan di televisi, serta situs internet. Saluran komunikasi politik meliputi komunikasi interpersonal dan komunikasi publik, radio, televisi, surat kabar dan *World Wide Web*. Audiens dari komunikasi politik juga merupakan hal yang penting sehingga memerlukan konsentrasi kepada reaksi masyarakat terhadap pesan-pesan politik, bagaimana masyarakat pada umumnya dan pemilih dalam sistem demokrasi menanggapi pesan-pesan politik, serta dampak dari semua jenis media dan jenis pesan (Kaid dan Holtz-Bacha, 2008).

1.6.2 Naratif

Teori naratif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu pengalaman dikonstruksikan dan diceritakan melalui rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Salah satu tokoh yang banyak digunakan dalam kajian naratif adalah Tzvetan Todorov. Menurut

Todorov, narasi pada dasarnya merupakan proses perubahan dari kondisi keseimbangan menuju gangguan, kemudian diakhiri dengan terbentuknya keseimbangan baru (Todorov, 1977:111). Dengan demikian, suatu cerita tidak hanya berisi rangkaian peristiwa, tetapi juga menggambarkan perubahan yang dialami oleh tokoh dalam menghadapi situasi tertentu.

Todorov menjelaskan bahwa setiap narasi memiliki struktur yang relatif universal dan dapat digunakan untuk memahami pengalaman manusia dalam berbagai konteks sosial. Struktur tersebut terdiri atas lima tahapan utama, yaitu *equilibrium* (keseimbangan awal), *disruption* (gangguan terhadap keseimbangan), *recognition of disruption* (kesadaran terhadap gangguan), *attempt to repair* (upaya memperbaiki gangguan), dan *new equilibrium* (keseimbangan baru) (Todorov, 1977:111-113). Kelima tahapan tersebut membentuk alur yang menunjukkan bagaimana seseorang mengalami perubahan dan beradaptasi terhadap situasi baru yang dihadapinya.

Tahap pertama adalah *equilibrium* atau keseimbangan awal. Pada tahap ini kehidupan tokoh berada dalam kondisi normal dan stabil sebelum munculnya peristiwa yang mengubah kehidupannya. Menurut Todorov, keseimbangan awal menggambarkan situasi ketika individu masih menjalankan rutinitas dan identitas yang telah mapan dalam kehidupannya (Todorov, 1977:111). Dalam penelitian ini, tahap keseimbangan awal merujuk pada kehidupan informan sebelum suami mereka memasuki dunia politik atau menduduki jabatan publik. Pada fase ini para informan menjalani kehidupan sesuai profesi dan peran sosial yang telah dimiliki sebelumnya, seperti sebagai bankir, ASN, maupun pengusaha.

Tahap kedua adalah *disruption* atau gangguan terhadap keseimbangan. Tahap ini ditandai dengan munculnya suatu peristiwa yang mengubah kondisi sebelumnya sehingga menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan tokoh (Todorov, 1977:111). Gangguan tersebut menjadi titik awal perubahan yang memaksa individu untuk beradaptasi dengan realitas baru. Dalam konteks

penelitian ini, gangguan terjadi ketika suami informan mulai terlibat dalam kontestasi politik atau menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan tersebut membawa konsekuensi sosial, politik, dan psikologis yang memengaruhi kehidupan para informan.

Tahap ketiga adalah *recognition of disruption* atau kesadaran terhadap gangguan yang terjadi. Pada tahap ini tokoh mulai menyadari bahwa perubahan yang muncul telah memengaruhi kehidupannya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kondisi yang baru (Todorov, 1977:112). Kesadaran tersebut biasanya ditandai dengan munculnya konflik, ketegangan, kecemasan, maupun tantangan yang sebelumnya tidak pernah dihadapi. Dalam penelitian ini, tahap tersebut terlihat ketika para informan mulai menyadari tuntutan sebagai figur publik, menghadapi konflik peran antara kehidupan pribadi dan publik, serta mengalami tekanan sosial yang muncul akibat posisi politik yang mereka sandang.

Tahap keempat adalah *attempt to repair* atau upaya memperbaiki gangguan. Menurut Todorov, pada fase ini tokoh berusaha mencari cara untuk mengatasi konflik dan membangun kembali keseimbangan yang telah terganggu (Todorov, 1977:112). Berbagai strategi dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru yang dihadapi. Dalam penelitian ini, upaya tersebut tampak melalui proses pembelajaran politik, keterlibatan dalam organisasi perempuan, pembangunan jaringan sosial, penguatan komunikasi dengan masyarakat, serta negosiasi identitas yang dilakukan oleh masing-masing informan untuk menjalankan peran sebagai istri pejabat.

Tahap terakhir adalah *new equilibrium* atau keseimbangan baru. Tahap ini menunjukkan bahwa individu telah berhasil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan menemukan bentuk keseimbangan yang baru dalam kehidupannya (Todorov, 1977:113). Keseimbangan baru tidak berarti kembali pada kondisi awal, melainkan terbentuknya identitas dan pola kehidupan yang berbeda sebagai hasil dari proses adaptasi yang telah dilalui. Dalam penelitian

ini, keseimbangan baru terlihat ketika para informan mampu menerima peran sebagai istri pejabat, menjalankan aktivitas publik secara lebih percaya diri, serta menemukan makna baru terhadap posisi sosial dan politik yang mereka jalani.

Teori naratif Todorov digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan pengalaman politik sebagai sebuah proses transformasi yang berlangsung secara bertahap. Pengalaman politik para informan tidak dipahami sebagai rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perjalanan yang dimulai dari kehidupan sebelum memasuki dunia politik, kemudian mengalami perubahan akibat jabatan politik suami, menghadapi berbagai konflik dan tantangan, melakukan penyesuaian diri, hingga akhirnya mencapai bentuk keseimbangan baru. Dengan demikian, teori Todorov membantu peneliti memahami bagaimana pengalaman politik istri pejabat dikonstruksikan melalui narasi kehidupan yang mereka ceritakan.

Berdasarkan teori Todorov, penelitian ini akan menganalisis pengalaman politik istri pejabat melalui lima tahapan naratif, yaitu kondisi kehidupan sebelum memasuki dunia politik (*equilibrium*), perubahan akibat masuknya politik ke dalam kehidupan keluarga (*disruption*), kesadaran terhadap berbagai konflik dan tuntutan baru (*recognition of disruption*), strategi adaptasi dan negosiasi yang dilakukan (*attempt to repair*), serta terbentuknya identitas baru sebagai istri pejabat (*new equilibrium*). Kelima tahapan tersebut digunakan untuk memahami proses transformasi pengalaman politik yang dialami oleh masing-masing informan.

1.6.3 Model Encoding-Decoding Stuart Hall sebagai Perangkat Bantu Kategorisasi Data

Selain teori komunikasi politik dan teori naratif Todorov, penelitian ini juga menggunakan model *encoding-decoding* Stuart Hall sebagai perangkat bantu dalam membaca data wawancara. Model ini tidak digunakan sebagai

teori utama penelitian, melainkan sebagai alat bantu untuk mengelompokkan data awal sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan naratif. Penegasan ini penting agar penelitian tetap konsisten sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif.

Stuart Hall menjelaskan bahwa pesan media atau pesan sosial tidak memiliki makna yang tunggal dan tetap. Makna diproduksi melalui proses *encoding*, yaitu proses ketika pembuat pesan menyandikan makna tertentu, dan *decoding*, yaitu proses ketika penerima pesan menafsirkan pesan tersebut (Hall, 1980). Dalam penelitian ini, model tersebut digunakan untuk membantu membaca bagaimana informan menyampaikan pengalaman politiknya, bagaimana mereka membangun makna terhadap peran sebagai istri pejabat, serta bagaimana mereka menafsirkan perubahan yang dialami.

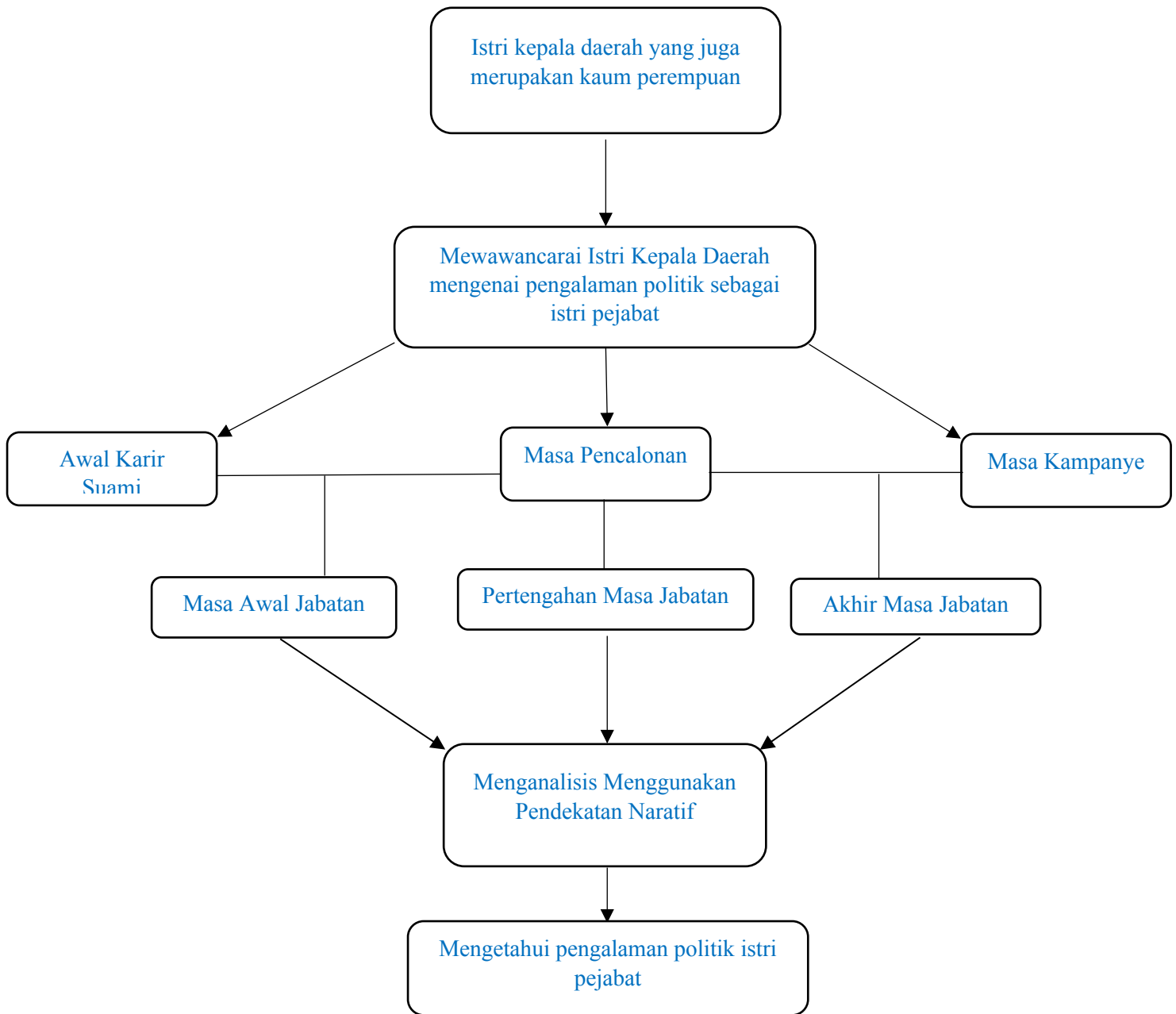
Model *encoding-decoding* digunakan secara terbatas melalui beberapa kategori, yaitu *frameworks of knowledge*, *relations of production*, *technical infrastructure*, *encoding*, dan *decoding*. *Frameworks of knowledge* membantu peneliti melihat latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang membentuk cara informan memahami politik. *Relations of production* membantu melihat struktur sosial dan institusional yang memengaruhi pengalaman mereka. *Technical infrastructure* membantu mengidentifikasi saluran sosial dan komunikasi yang digunakan informan. Sementara itu, *encoding* dan *decoding* membantu melihat bagaimana informan membangun serta memaknai pesan mengenai pengalaman politik mereka.

Namun demikian, model Stuart Hall dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menggantikan teori naratif. Setelah data dikelompokkan melalui kategori awal tersebut, analisis utama tetap diarahkan pada struktur naratif Todorov. Dengan demikian, kategori Stuart Hall berfungsi sebagai perangkat bantu untuk merapikan data wawancara, sedangkan teori Todorov berfungsi sebagai kerangka utama untuk membaca alur pengalaman politik informan.

Penggunaan model *encoding-decoding* sebagai perangkat bantu juga membantu peneliti menghindari pembacaan data yang terlalu deskriptif. Melalui kategori tersebut, peneliti dapat melihat bahwa pengalaman politik informan tidak hanya terbentuk oleh peristiwa yang mereka alami, tetapi juga oleh pengetahuan, struktur sosial, jaringan komunikasi, serta cara mereka menyandikan dan memaknai peran publiknya. Selanjutnya, temuan tersebut disusun ke dalam alur naratif agar pengalaman politik istri pejabat dapat dipahami sebagai proses transformasi identitas.

Dengan demikian, posisi teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Komunikasi politik digunakan untuk memahami aktivitas dan relasi publik istri pejabat. Teori naratif Todorov digunakan sebagai kerangka utama untuk membaca alur pengalaman politik informan. Sementara itu, model *encoding-decoding* Stuart Hall digunakan sebagai perangkat bantu kategorisasi data wawancara. Pembagian ini membuat penelitian tetap memiliki konsistensi metodologis dan tidak mencampurkan teori secara tidak terarah.

1.7 Operasionalisasi Konsep



Gambar 1.4 Operasionalisasi Konsep

Istri kepala daerah berperan sebagai sosok yang membantu pekerjaan suaminya tidak hanya selama masa jabatannya, namun ketika sebelum suaminya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah hingga masa kampanye sampai dengan suaminya terpilih menjadi kepala daerah dan menjalankan tugasnya. Biasanya seorang istri kepala daerah akan membantu suaminya di bidang kesehatan, perempuan dan anak.

Penelitian naratif yang dijelaskan oleh Clandinin merupakan penelitian yang tidak hanya berfokus pada menghargai pengalaman individu, tapi juga merupakan eksplorasi sosial, budaya, kekeluargaan, linguistik, dan narasi kelembagaan dimana pengalaman individu dibentuk, diungkapkan dan diberlakukan (Creswell dan Poth, 2018, p. 110).

Operasionalisasi konsep ini disusun dengan mengacu pada teori naratif Tzvetan Todorov. Pengalaman politik istri pejabat dibaca sebagai perjalanan naratif yang terdiri atas lima tahap, yaitu *equilibrium*, *disruption*, *recognition of disruption*, *attempt to repair*, dan *new equilibrium*. Tahap *equilibrium* digunakan untuk memahami kehidupan informan sebelum politik. Tahap *disruption* digunakan untuk melihat perubahan ketika suami memasuki jabatan publik. Tahap *recognition of disruption* digunakan untuk membaca kesadaran informan terhadap konflik dan tuntutan baru. Tahap *attempt to repair* digunakan untuk menjelaskan strategi adaptasi dan negosiasi. Tahap *new equilibrium* digunakan untuk memahami terbentuknya identitas baru sebagai istri pejabat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan model *encoding-decoding* Stuart Hall secara terbatas sebagai perangkat bantu kategorisasi awal data wawancara. Kategori seperti *frameworks of knowledge*, *relations of production*, *technical infrastructure*, *encoding*, dan *decoding* digunakan untuk membantu peneliti membaca latar belakang pengetahuan, struktur sosial, saluran komunikasi, serta cara informan memproduksi dan memaknai pengalaman politiknya.

Namun, analisis utama tetap disusun berdasarkan alur naratif Todorov agar pengalaman politik informan dapat dipahami sebagai proses transformasi.

Penelitian dimulai dari mewawancari istri-istri kepala daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini, yaitu Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya mengenai komunikasi politik dan narasai politik yang sudah mereka lakukan. Komunikasi politik yang dimaksud adalah cara istri-istri kepala tersebut menyampaikan pesan-pesan politik baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Kemudian narasi politik yang dimaksud adalah cerita yang mereka bentuk dan sampaikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, keyakinan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik yang beredar.

Pertanyaan wawancara akan dibagi dalam 6 fase. Fase-fase tersebut adalah masa awal karir suami, masa pencalonan suami, masa kampanye suami, masa awal jabatan, pertengahan masa jabatan, dan akhir masa jabatan. Pembagian tersebut dilakukan untuk mengetahui cerita sejak awal karir suami istri kepala daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini yang kemudian memutuskan mencalonkan diri menjadi kepala daerah hingga terpilih dan melaksanakan tugasnya, sampai dengan akhir masa jabatannya secara lebih rinci. Dengan begitu, penelitian ini akan mengetahui komunikasi politik yang dilakukan istri kepala daerah selama mendampingi suaminya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara dengan subjek penelitian, kemudian menyusun hasil wawancara menjadi paragraf.

1.8.2 Setting Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi yang masing-masing istri kepala daerah berkenan untuk melakukan wawancara. Untuk wawancara dengan ibu Krisseptiana akan dilakukan di kediaman beliau yang ada di Jl. Bukit Hijau 3, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang. Untuk wawancara dengan ibu Listyati Purnama Rusdiana dilakukan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sriwijaya No.29a, Kota Semarang. Untuk wawancara dengan ibu Inggit Soraya dilakukan di rumah dinas Walikota Pekalongan, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 15, Kota Pekalongan.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga akan mengukutip informasi dari berita *online* terkait kegiatan apa saja yang dilakukan ketiga istri kepala daerah tersebut untuk mendukung hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut juga sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian berperan sebagai sumber data dan bukan sebagai objek penelitian Dimana mereka menjawab pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia (Raco, 2010, p. 8). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah istri-istri kepala daerah yang sedang menjabat atau yang sudah selesai masa jabatannya. Istri kepala daerah yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ibu Krisseptiana sebagai istri mantan Walikota Semarang yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia, yaitu bapak Hendrar Prihadi.

Selain ibu Krisseptiana, ibu Listyati Purnama Rusdiana sebagai istri dari bapak Iswar Aminuddin, selaku Wakil Walikota Semarang. Selama masa jabatan suaminya, ibu Listyati Purnama Rusdiana menjabat sebagai Ketua PKK Kota Semarang sekaligus sebagai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan.

Kemudian ibu Inggit Soraya sebagai istri dari Walikota Pekalongan. Ada beberapa jabatan yang bu Inggit duduki selama masa jabatan suaminya, yaitu Ketua PKK Kota Pekalongan, Ketua Dekranasda, Bunda Genre, dan beberapa jabatan lainnya.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

1.8.4.1 Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah hasil analisis atau hasil wawancara dari ketiga istri kepala daerah.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah referensi dari buku-buku terkait, jurnal-jurnal nasional dan internasional, serta informasi yang dikutip dari artikel atau berita *online*.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis sudah disiapkan sebelumnya beserta dengan jawabannya. Tujuan dilakukan wawancara atau *interview* adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan melalui teknik observasi atau kuesioner (Raco, 2010, p.116).

1.8.5.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan. Dengan kata lain, observasi mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data (Raco, 2010, p. 112).

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa material yang tertulis dan tersimpan. Dokumentasi juga dapat berupa memorabilia atau korenspondensi dan audiovisual (Raco, 2010, p. 111).

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara terhadap istri kepala daerah yang dijadikan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah transkripsi data wawancara. Seluruh hasil wawancara diubah ke dalam bentuk teks agar dapat dibaca, diperiksa, dan dianalisis secara mendalam. Transkrip wawancara menjadi dasar utama dalam penyusunan narasi pengalaman politik informan.

Tahap kedua adalah pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara. Pembacaan berulang dilakukan untuk memahami cerita informan secara utuh, menemukan bagian-bagian penting dalam pengalaman mereka, serta mengidentifikasi perubahan peran, konflik, tekanan, strategi adaptasi, dan pemaknaan yang muncul dalam narasi.

Tahap ketiga adalah koding awal data. Pada tahap ini, peneliti menggunakan kategori awal yang dibantu oleh model *encoding-decoding* Stuart Hall, seperti *frameworks of knowledge, relations of production, technical infrastructure, encoding*, dan *decoding*. Tahap keempat adalah analisis naratif menggunakan teori Todorov. Setelah data dikelompokkan, peneliti menyusun pengalaman politik masing-masing informan ke dalam lima tahapan naratif, yaitu *equilibrium, disruption, recognition of disruption, attempt to repair*, dan *new equilibrium*. Tahap ini menjadi analisis utama karena penelitian berfokus pada pengalaman politik sebagai cerita transformasi hidup.

Tahap kelima adalah membandingkan narasi antar-informan. Perbandingan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan pengalaman politik Krisseptiana, Listyati Purnama Rusdiana, dan Inggit Soraya. Perbandingan ini digunakan untuk menemukan pola umum mengenai pengalaman politik istri pejabat, sekaligus menunjukkan kekhasan pengalaman masing-masing informan berdasarkan latar belakang sosial, profesional, dan posisi institusional mereka. Tahap keenam adalah interpretasi temuan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan pengalaman politik istri pejabat dengan mengaitkan hasil analisis naratif dengan konsep komunikasi politik. Interpretasi dilakukan untuk menjelaskan bagaimana istri pejabat menjalankan komunikasi politik, bagaimana mereka menegosiasikan identitas, serta bagaimana mereka membentuk makna atas peran publik yang dijalani.

1.9 Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Metodenya sendiri dilakukan dengan cara menganalisis hasil wawancara dengan subjek penelitian, kemudian menyusun hasil wawancara menjadi paragraf. Penelitian ini berfokus pada pengalaman politik istri kepala daerah terjun ke dunia politik hingga memutuskan terjun ke dunia politik, komunikasi politik yang dilakukan istri kepala daerah terhadap masyarakat selama masa jabatannya, serta peran yang diperankan selama masa jabatan mereka.